

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS  
(DAK), DANA BAGI HASIL (DBH) TERHADAP BELANJA MODAL  
(Studi Empiris Pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah Tahun  
2011-2014)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada  
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Oleh:

**GALIH PUTRANTO**  
**B 200 130 341**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2017**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan dibawah ini telah membaca skripsi dengan judul:  
PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS  
(DAK), DANA BAGI HASIL (DBH) TERHADAP BELANJA MODAL  
(Studi empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2011-  
2014)

## PUBLIKASI ILMIAH

OLEH:

GALIH PUTRANTO

B200130341

Telah diperiksa dan di setujui oleh:

Surakarta, Januari 2017

Dosen Pembimbing



(Drs. Wahyono, M.A., Akt., CA.)

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DANA BAGI HASIL (DBH) TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2011-2014)**

Oleh:

GALIH PUTRANTO  
B 200 130 341

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Jum'at, 7 April 2017  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Drs. Wahyono, M.A., Akt., CA.  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Drs. Suyatmin Waskito Adi., M.Si.  
(Anggota II Dewan Penguji)
3. Dr. Erma Setiawati, M.M., Akt., CA  
(Anggota III Dewan Penguji)

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



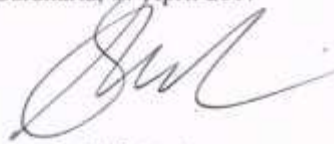
  
Dr. Triyono, SE., M.Si

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesejahteraan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidaksamaan dalam pernyataan diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 07 April 2017



Galih Putranto  
B 200 130 341

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS  
(DAK), DANA BAGI HASIL (DBH) TERHADAP BELANJA MODAL  
(Studi Empiris Pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah Tahun  
2011-2014)**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris dengan menggunakan data sekunder, mengenai pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal. Sampel yang digunakan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2011-2014 yaitu sebanyak 35. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan sampel jenuh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis mencakup linier berganda, uji F, uji  $R^2$  dan uji t. semua data yang diperoleh, diolah dengan menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas. Berdasarkan hasil pengujian statistik  $t_{hitung}$  probabilitas DAU sebesar  $0,000 < = 0,05$ ,  $t_{hitung}$  probabilitas DAK sebesar  $0,087 > = 0,05$ ,  $t_{hitung}$  probabilitas DBH sebesar  $0,003 < = 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa DAU dan DBH berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

*Kata Kunci: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Belanja Modal.*

**Abstract**

*This research aims to provide empirical evidence by using secondary data, regarding to the effect of the General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), Revenue-Sharing Funds (DBH) to the Capital Expenditure. The researcher used Local Government of Regency/ City in central of java as a sample in 2011-2014 as many a 35. The sampling technique for this study is saturated sample. The researcher used descriptive analysis method for this research. The researcher used test hypothesis as the data analysis technique which include multiple linear, F test, test and test  $t R^2$ . All of the data collected, processed using the test the classical assumption of normality test, autocorrelation, multicollinearity test, and test heterokedastisitas. Based on the results of statistical tests  $t$ -count probabilitas DAU  $0,000 < = 0.05$ ,  $t$ -count DAK probability of  $0.087 > = 0.05$ , DBH  $t$ -count probability of  $0,003 < = 0.05$ . This shows that the GAF and RSF affect the significance of the Capital Expenditure, while SAF no significant effect on Capital Expenditure.*

*Keywords: General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), Revenue-Sharing Funds (DBH), and Capital Expenditure.*

## **1. PENDAHULUAN**

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat-Daerah, Dalam UU tersebut perimbangan keuangan pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya. Wujud dari perimbangan keuangan tersebut adalah adanya dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

Salah satu belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membangun aset tetap. Tujuan membangun aset tetap berupa fasilitas, sarana prasarana serta infrastruktur adalah menyediakan pelayanan publik yang memadai sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Apabila suatu daerah yang memiliki sarana prasarana yang memadai dapat membuat investor untuk melakukan investasi dan masyarakat dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan nyaman sehingga tingkat produktivitas akan meningkat (Kartika Jaya dan Dwirandra, 2014)

## **2. METODE PENELITIAN.**

### **2.1 Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah data Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Modal kota dan kabupaten di provinsi Jawa Tengah yang meliputi 29 daerah kabupaten dan 6 daerah kota sehingga total populasi adalah 35 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.

Sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan metode *Non Probability Sampling*, yaitu dengan pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan dan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk menjadi sampel dalam penelitian. Metode *Non Probability Sampling* yang digunakan adalah *Sampling* Jenuh. Penelitian ini mengambil data pada tahun 2011-2014, dengan jumlah sampel sebanyak 35 daerah, sehingga jumlah sampel penelitian keseluruhan berjumlah  $4 \times 35 = 140$  data.

## **2.2 Data dan Sumber Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa dari Laporan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2014, yang terdiri dari data realisasi, DAU, DAK, DBH, dan data realisasi Belanja Modal yang diperoleh dari Situs Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah ([www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)) Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi yang diperoleh dari situs resmi Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah ([www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)) melalui internet, yaitu data Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Modal.

## **2.3 Definisi Operasional Variabel**

### **2.3.1 Variabel Dependen**

#### **Belanja Modal**

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, yang tujuannya untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Belanja modal ada 5 (lima) kategori utama : 1) Belanja Modal Tanah, 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin, 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan, 4) Belanja Modal Jalan, irigasi, dan Jaringan, 5) Belanja Modal Fisik lainnya (Halim, 2007:101 dalam Arwati dan Hadiati, 2013).

### **2.3.2 Variabel Independen**

#### **Dana Alokasi Umum (DAU)**

Menurut UU No. 33 tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada hakekatnya mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah, sebagai konsekuensi dari adanya pembagian tugas antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah merupakan suatu sistem yang menyuruh dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, maupun tugas pembantuan.

#### **Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Menurut UU 33 tahun 2004, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu. Dana Alokasi Khusus bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu, khususnya dalam pemenuan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat (Darise, 2007: 84).

#### **Dana Bagi Hasil (DBH)**

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu dengan memerhatikan potensi daerah penghasil. Dana Bagi Hasil terdiri dari Dana Bagi hasil bersumber dari pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam ( Darise, 2007: 83).

### **2.4 Metode Analisis Data**

Analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Berganda dengan terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan adalah



uji normalitas data, multikolinearitas, heterokedastis, otokorelasi. Dan model sebagai berikut:

$$BM = \alpha + \beta_1 DAU + \beta_2 DAK + \beta_3 DBH + e$$

Keterangan:

BM	= Belanja Modal
$\alpha$	= Constanta
$\beta_1 DAU$	= Dana Alokasi Umum (DAU)
$\beta_2 DAK$	= Dana Alokasi Khusus (DAK)
$\beta_3 DBH$	= Dana Bagi Hasil (DBH)
e	= Error

### 3. Analisis Data dan Pembahasan

#### 3.1 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan terhadap asumsi klasik atas persamaan regresi linier berganda yang digunakan. Data harus didistribusikan secara normal, tidak mengandung multikolinearitas, autokorelasi, dan heterokedastisitas.

##### 3.1.1 Hasil Uji Normalitas

Dari hasil pengujian normalitas menggunakan Kolmogorov- Smirnov dapat diketahui bahwa hasil perhitungan *Kolmogorov-Smirnov* adalah 0,866 dengan signifikansi 0,441 sehingga semua variabel diketahui lebih besar dari  $(p > 0,05)$ , maka dapat dinyatakan data residual berdistribusi normal atau seluruh data memiliki sebaran data normal.

##### 3.1.2 Hasil Uji Mutikolinearitas

Menunjukkan bahwa nilai VIF untuk variabel DAU, DAK, DBH masing-masing adalah 1,613, 1,581, 1,028. Sedangkan *Tolerance*-nya masing-masing adalah 0,620, 0,633, 0,973. Hasil ini menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,1 (10%) dan hasil perhitungan juga menunjukkan bahwa semua variabel bebas memiliki VIF kurang dari 10, artinya tidak ada kolerasi antar variabel bebas. Jadi dapat disimpulkan tidak ada gejala multikolinieritas dalam model regresi yang digunakan.

### 3.1.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi perbedaan *variance* residual suatu periode pengamatan yang lain. menunjukkan tidak ada gangguan heteroskedastisitas yang terjadi dalam proses estimasi parameter model penduga, dimana tidak ada *p-value* kurang dari 0,05. Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

### 3.1.4 Hasil Uji Autokorelasi

Salah satu pengujian yang digunakan untuk mengetahui adanya autokorelasi adalah dengan memakai uji statistik DW. menunjukkan bahwa nilai D-W sebesar 1,588. Dengan jumlah variabel independen sebanyak 4 variabel ( $k-3$ ) dan sampel sebanyak 133 data ( $n=133$ ). Berdasarkan tabel D-W dengan tingkat signifikansi 5%, maka dapat ditemukan nilai ( $du$ ) adalah sebesar 1,763. Dengan demikian nilai  $du < DW < 4-du$  yaitu  $1,763 < 1,588 < 2,237$  yang menandakan bahwa terdapat masalah autokorelasi dalam model regresi, kemudian diobati dengan **uji Run Test**, diperoleh dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,192 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, data yang dipergunakan cukup random sehingga tidak terdapat masalah autokorelasi pada data yang diuji.

## 3.2 Pengujian Hipotesis

### 3.2.1 Hasil Uji Hipotesis

#### **Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja Modal**

Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) diketahui nilai *t*-hitung sebesar 9,026 lebih besar dari *t*-tabel sebesar 1,978 atau dapat dilihat dari nilai signifikansi  $0,000 < = 0,05$ . Oleh karena itu,  $H_1$  diterima, artinya variabel DAU mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sangat bergantung terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) untuk menambah aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberi nilai manfaat lebih dari satu tahun, dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan melaksanakan fungsi layanan dasar umum.

### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal**

Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) diketahui mempunyai nilai t-hitung sebesar -1,727 lebih kecil dari t-tabel sebesar 1,978 atau dapat dilihat dari nilai signifikansi  $0,087 > = 0,05$ . Oleh karena itu,  $H_2$  ditolak, artinya variabel DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak mampu meningkatkan belanja modal karena Pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sudah dapat memenuhi kebutuhan Belanja Modalnya dengan menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat dalam pembangunan sarana dan prasarana.

### **Pengaruh Dana bagi Hasil (DBH) terhadap belanja modal**

Variabel Dana Bagi Hasil (DBH) diketahui nilai t-hitung sebesar 3,009 lebih besar dari t-tabel sebesar 1,978 atau dapat dilihat dari nilai signifikansi  $0,003 < = 0,05$ . Oleh karena itu,  $H_3$  diterima, artinya variabel DBH mempunyai berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini dikarenakan Hasil ini menjelaskan bahwa provinsi yang mendapatkan DBH yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang besar pula. Hasil ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan DBH. Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan prosentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil. Jadi dapat disimpulkan jika anggaran DBH meningkat maka alokasi belanja modal pun meningkat.

## **4. PENUTUP**

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh terhadap belanja modal, Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap belanja modal, Dana Bagi Hasil (DBH) mempunyai berpengaruh terhadap belanja modal. Beberapa keterbatasan sebagai berikut: Sampel penelitian ini hanya kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah. Hal ini menyebabkan hasil penelitian hanya berlaku untuk kabupaten/kota yang menjadi sampel, sehingga belum dapat

digeneralisasi untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia, Dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), sehingga terdapat kemungkinan variabel-variabel lain yang lebih signifikan terhadap belanja modal, Periode penelitian ini dibatasi hanya dari tahun 2011-2014. Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang telah di ungkapkan penulis dapat memberikan saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut: (1) Pada masa yang akan datang pemerintah pusat diharapkan dapat meningkatkan porsi Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada daerah yang memerlukan dukungan dana untuk pembangunan sarana dan prasarana, (2) Bagi penelitian selanjutnya diharapkan memperbanyak jumlah sampel, sehingga tidak hanya instansi pemerintah daerah tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Tengah saja, tetapi seluruh Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, (3) Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel lain karena dimungkinkan ada variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini yang mungkin mempunyai pengaruh terhadap belanja modal, (4) Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah periode pengamatan sehingga hasil penelitian akan lebih baik dan hasilnya konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arwati, Dini dan Hadiati, Novita. 2013. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat*. SEMANTIK 2013. ISSN: 979-26-0266-6.
- Darise, Nurlan. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. PT Indeks: Gorontalo.
- Dwi Putra, dkk. 2015. *Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. ISSN: 2303-1018. Vol. 13.3.
- Ghozali, imam. 2011. *Aplikasi Analisis multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: BPUD
- Gudono. 2012. *Analisis Data Multivariat*. BPFE: Yogyakarta.
- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2006. "Hubungan dan masalah keagenan di pemerintahan daerah: sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi". Jurnal Akuntansi Pemerintah.

- Heliyanto, Firnandi dan Handayani, Nur. 2016. *Pengaruh PAD, DAU, DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. ISSN: 2460-0585. Vol 5. No. 3.
- Kartika Jaya, I Putu Ngurah Panji dan Dwirandra, A.A.N.B. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. ISSN: 2302-8556. Vol. 7.1.
- Kuncoro, Mudrajad. 2015. *Otonomi Daerah: Menuju Era baru Pembangunan Daerah Edisi 3*. Erlangga: Jakarta.
- Nuarisa, Sheila Ardhian. 2013. *Pengaruh PAD, DAU Dan DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. *Accounting Analysis Journal (AAJ)* 2 (1). ISSN: 2252-6765.
- Oktora, Fahri Ekan dan Wiston, Pontoh. *Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus atas Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah*. *Jurnal Accountability*. Vol. 2. No. 1. Juni 2013.
- Palealu, Andreas Marzel. 2013. *Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012*. *Jurnal EMBA*. ISSN: 2303-1174. Vol. 1. No.4.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, *tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Rosidin, utang. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Pusaka Setia: Bandung.
- Simanjuntak, Robert A. dan Hidayanto, Joko. 2002. *Dana Alokasi Umum: Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Buku Kompas: Jakarta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta: Bandung
- Suhendra, I Made Dwi Septiadi, dan Sulindawati, Ni Luh Gede Erni, dkk. 2015. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Pemeliharaan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Bali Periode 2009-2013*. *E-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol. 3. No. 1 Tahun 2015.
- Tanjung, Abdul Hafiz, 2007. *Akuntansi Pemerintahan Daerah: Konsep dan Aplikasi*. Alfabeta: Bandung.
- Verawati. Merina, Citra Indah dan Sari, Mela. 2015. *Determinan Pengalokasian Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating pada Pemerintahan Provinsi di Indonesia*. *Simposium Nasional Akuntansi 18*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Wandira, Arbie Gugus. 2013. *Pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. *Accounting Analysis Journal*. ISSN 2252-6765

[www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)

Yovita, Farah Marta. 2011. "*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008 – 2010)*". Diponegoro Jurnal Of Accounting. Semarang: UNDIP.